

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Pemerintah Provinsi Papua

Djimmy Yomaiwi Douw¹, Fahrudin Pasolo², Muh Yamin Noch³, Zakaria⁴,
Yaya Sonjaya⁵

^{1, 2, 4} Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

^{3, 5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

E-mail Korespondensi: Fahrudinpasolo@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi penelitian ini adalah aparatur sipil negara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada OPD di Pemerintah Provinsi Papua. Sampel penelitian berjumlah 103 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 26.0 for Windows.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara simultan, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,819 menunjukkan bahwa 81,9% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh model penelitian.

Implikasi Penelitian: Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu difokuskan pada penguatan kompetensi aparatur dan optimalisasi penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang didukung oleh pengendalian internal yang efektif.

Kata Kunci: *Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan.*

Pendahuluan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut melalui laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah, legislatif, auditor, dan masyarakat. Kualitas laporan keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung terwujudnya good governance dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil (Mahmudi, 2019; PP No. 71 Tahun 2010).

Secara nasional, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi dalam pengelolaan keuangan negara melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Namun demikian, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pengendalian internal, serta kapasitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sistem yang memadai, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mengimplementasikan berbagai instrumen pengelolaan keuangan secara efektif (BPK RI, 2023; Kementerian Keuangan RI, 2023).

Kondisi tersebut masih menjadi tantangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Meskipun Pemerintah Provinsi Papua telah beberapa kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, berbagai temuan pemeriksaan masih menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kesalahan penganggaran pada sejumlah OPD, pengelolaan pendapatan yang belum optimal, serta temuan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil telaahan Badan Akuntansi Keuangan Negara DPR RI menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Papua masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (BAKN DPR RI, 2020; BPK RI Perwakilan Papua, 2022).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompetensi aparatur pemerintah. Kompetensi aparatur mencerminkan kemampuan pegawai dalam memahami regulasi, melaksanakan proses akuntansi, serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai akan lebih mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik (Sedarmayanti, 2017; Cheng et al., 2002).

Selain kompetensi aparatur, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga berperan strategis dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi yang efektif memungkinkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penerapan sistem akuntansi yang baik, pemerintah daerah dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Keberhasilan penerapan SAKD menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013; Halim & Kusufi, 2017).

Faktor lain yang berperan penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan dalam suatu organisasi, semakin kecil risiko terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam proses pengelolaan keuangan. Dengan demikian, keberadaan SPI yang efektif diyakini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (PP No. 60 Tahun 2008; Bastian, 2011).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Penelitian Dewi dan Dewi (2020), Rahman dan Permatasari (2021), serta Cokorda dan Gusti (2022) menemukan bahwa kompetensi aparatur, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, penelitian Adhivina dan Hikmahwati (2020), Kaifah dan Tryana (2020), serta Pravasanti (2019) menunjukkan bahwa beberapa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan empiris (research gap) yang memerlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks daerah dengan karakteristik yang berbeda, termasuk di Provinsi Papua.

Penelitian ini dilakukan karena masih terbatasnya penelitian yang secara simultan menguji pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Papua. Karakteristik Papua sebagai daerah otonomi khusus dengan tantangan geografis, kapasitas birokrasi, dan ketergantungan fiskal yang relatif tinggi menjadikan hasil penelitian dari daerah lain belum tentu dapat digeneralisasi pada konteks Papua (BAKN DPR RI, 2020; UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua).

Pemilihan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya sebagai entitas akuntansi yang bertanggung jawab langsung atas proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. OPD merupakan unit organisasi yang menyusun laporan keuangan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, sistem akuntansi yang digunakan, serta efektivitas pengendalian internal yang diterapkan pada masing-masing OPD (PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dalam konteks Pemerintah Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian barat, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pada daerah dengan karakteristik fiskal, kelembagaan, dan geografis yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di kawasan timur Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penguatan kompetensi aparatur, optimalisasi sistem akuntansi keuangan daerah, serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperluas kajian mengenai determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di wilayah otonomi khusus dan kawasan timur Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Stewardship Theory

Stewardship Theory pertama kali dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menjelaskan bahwa manajer atau pengelola organisasi pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Teori ini berasumsi bahwa individu memiliki motivasi intrinsik untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah berperan sebagai pengelola sumber daya publik yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik (Donaldson & Davis, 1991).

Dalam penelitian ini, *Stewardship Theory* digunakan untuk menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi aparatur, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan efektivitas sistem pengendalian internal merupakan instrumen yang mendukung aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi *stewardship*. Semakin baik kemampuan aparatur dan sistem yang diterapkan, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (Mahmudi, 2019).

Agency Theory

Agency Theory diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan amanah (principal) dan pihak yang menerima amanah (agent). Dalam sektor publik, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk mengelola sumber daya publik dan melaksanakan pembangunan. Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan masalah asimetri informasi karena pemerintah memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai (Jensen & Meckling, 1976).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi aparatur, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan (Scott, 2015).

Teori Kompetensi (Competency Theory)

Teori kompetensi menjelaskan bahwa keberhasilan individu dalam melaksanakan pekerjaannya sangat dipengaruhi oleh pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang dimilikinya. Spencer dan Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang berkaitan secara langsung dengan efektivitas kinerja dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan analitis, pemecahan masalah, komunikasi, dan pengambilan keputusan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kompetensi aparatur menjadi faktor yang sangat penting karena proses penyusunan laporan keuangan memerlukan pemahaman yang memadai mengenai regulasi, standar akuntansi, sistem keuangan daerah, serta prosedur pelaporan keuangan pemerintah. Aparatur yang kompeten akan lebih mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Spencer & Spencer, 1993; Sedarmayanti, 2017).

Teori Sistem Informasi Akuntansi

Teori Sistem Informasi Akuntansi menjelaskan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi manusia, prosedur, teknologi, dan basis data yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Menurut Romney dan Steinbart (2021), sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, menyimpan, dan mengomunikasikan informasi keuangan agar dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk mengelola transaksi keuangan pemerintah daerah secara sistematis dan terintegrasi. Penerapan sistem akuntansi yang efektif memungkinkan tersedianya informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas sistem akuntansi keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Romney & Steinbart, 2021; Halim & Kusufi, 2017).

Teori Pengendalian Internal (Internal Control Theory)

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan serta seluruh anggota organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai tercapainya tujuan organisasi. Kerangka pengendalian internal yang paling banyak digunakan adalah COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) yang menekankan lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (COSO, 2013).

Dalam sektor publik, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bentuk implementasi pengendalian internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan karena risiko kesalahan dan penyimpangan dapat diminimalkan (COSO, 2013; PP Nomor 60 Tahun 2008).

Pengembangan Hipotesis

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Dalam perspektif Stewardship Theory, aparatur pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sementara itu, Agency Theory menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kompetensi aparatur pemerintah, efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah, serta sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi aparatur pemerintah merupakan kemampuan yang dimiliki pegawai yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, aparatur yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih mampu memahami regulasi, menerapkan standar akuntansi, serta menyusun laporan keuangan secara tepat dan akurat. Semakin tinggi kompetensi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian Dewi dan Dewi (2020), Rahman dan Permatasari (2021), serta Cokorda dan Gusti (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₁: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang efektif memungkinkan seluruh transaksi keuangan dicatat secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Dalam perspektif sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem yang digunakan dalam proses pengolahan data keuangan. Penelitian Ardianto (2019), Maydiyanti dkk. (2020), dan Angreini dkk. (2021) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan. Pengendalian internal yang efektif mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, mencegah penyimpangan, serta memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, semakin

tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian Angreini dkk. (2021), Fazlurahman dkk. (2021), dan Nurul Fathia dkk. (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₃: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi juga merupakan hasil interaksi berbagai aspek yang mendukung proses pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi aparatur yang memadai akan mendukung pemahaman terhadap sistem akuntansi dan pengendalian internal, sedangkan sistem akuntansi yang baik dan pengendalian internal yang efektif akan memastikan informasi keuangan disajikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama diyakini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Angreini dkk. (2021), Maydiyanti dkk. (2020), dan Fazlurahman dkk. (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₄: Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik dan analisis statistik. Menurut Sugiyono (2017), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan maupun pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria responden meliputi pejabat dan pegawai yang memiliki tugas serta tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian (Sekaran & Bougie, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan karena mampu menjelaskan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial (Ghozali, 2018; Hair et al., 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil analisis deskriptif statistik terhadap 103 responden menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 3,4688 dengan standar deviasi 0,91757; variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 3,5077 dengan standar deviasi 0,84645; dan variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai rata-rata sebesar 3,4718 dengan standar deviasi 0,85857. Sementara itu, variabel Kualitas Laporan Keuangan memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,9563 dengan standar deviasi 0,66828. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan penilaian yang cenderung baik terhadap seluruh variabel penelitian, yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata masing-masing variabel yang berada di atas angka 3,00 pada skala Likert lima poin. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata mengindikasikan bahwa jawaban responden relatif homogen dan tidak menunjukkan penyimpangan yang besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah berjalan cukup baik serta didukung oleh kualitas laporan keuangan yang dinilai baik oleh responden, dengan nilai *Descriptive Statistics* yang diperoleh dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Pemerintah	103	1,67	5,00	3,4688	0,91757
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	103	2,00	5,00	3,5077	0,84645
Kualitas Laporan Keuangan	103	2,50	5,00	3,9563	0,66828
Sistem Pengendalian Internal	103	2,20	5,00	3,4718	0,85857
Valid N (listwise)	103				

Sumber: Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat validitas setiap item pernyataan dalam instrumen penelitian. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap 103 responden, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1937. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), Sistem Pengendalian Internal (X_3), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid, sehingga instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti dan layak digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini.

Pengujian reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha, di mana suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2017; Sujarweni, 2015). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Items* sebesar 0,807, yang menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,819 dengan kategori sangat reliabel, sedangkan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,736, Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,728, dan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,681, yang semuanya berada pada kategori reliabel. Seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner mempunyai tingkat konsistensi yang baik, dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data, dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, dengan hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliability

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0,793	0,807	4

Sumber: Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Dari hasil analisis uji reliabilitas diperoleh nilai *alpha Cronbach* masing-masing variabel dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 *for Windows*, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	No Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Pemerintah	3	0,819	Sangat Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	3	0,736	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	5	0,728	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	4	0,681	Reliabel

Sumber: Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal sehingga layak digunakan dalam analisis regresi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan grafik histogram dan normal P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil tersebut diperkuat oleh uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Sebesar 0,200 lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah memiliki nilai tolerance sebesar 0,934 dan VIF sebesar 1,070; variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai tolerance sebesar 0,307 dan VIF sebesar 3,257; sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai tolerance sebesar 0,298 dan VIF sebesar 3,351. Seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas dan seluruh variabel independen dapat digunakan dalam model penelitian.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan grafik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan atau homoskedastis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi linier berganda.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Hasil persamaan regresi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

	Model	Unstandardized Coefficients		T _{hitung}	Sig
		B	Std. Error		
1	(Constant)	1,067	0,148	7,206	0,000
	Kompetensi Aparatur Pemerintah	0,572	0,032	18,039	0,000
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,329	0,060	5,493	0,000
	Sistem Pengendalian Internal	0,072	0,060	1,199	0,233

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.17, diperoleh persamaan regresi $Y = 1,067 + 0,572X_1 + 0,329X_2 + 0,072X_3 + e$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi positif, yang berarti peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal cenderung diikuti oleh peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

Nilai konstanta sebesar 1,067 menunjukkan bahwa apabila variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal dianggap konstan, maka Kualitas Laporan Keuangan bernilai 1,067. Selanjutnya, koefisien regresi Kompetensi Aparatur Pemerintah sebesar 0,572 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Kompetensi Aparatur Pemerintah akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,572 satuan. Koefisien regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,329 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,329 satuan. Sementara itu, koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,072 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Sistem Pengendalian Internal akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,072 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji signifikansi parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} sebesar 1,6598 pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.17, diketahui bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X_1) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 18,039 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($18,039 > 1,6598$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta menjadi variabel yang paling dominan dalam penelitian ini.

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,493 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,493 > 1,6598$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sementara itu, variabel Sistem Pengendalian Internal (X_3) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,199 dengan tingkat signifikansi 0,233. Hasil tersebut menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1,199 < 1,6598$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,233 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dengan demikian, Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Tabel 5. Hasil Uji F (uji Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	37,566	3	12,522	155,203	,000b
Residual	7,987	99	0,081		
Total	45,553	102			

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai F hitung sebesar 155,203 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 2,6928 ($155,203 > 2,6928$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, tetapi merupakan hasil sinergi antara kompetensi aparatur yang memadai, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif, dan sistem pengendalian internal yang baik dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas.

Tabel 6. Hasil Uji Determinan

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,908a	0,825	0,819	0,28404	1,466

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen, yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah (X_1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2), dan Sistem Pengendalian Internal (X_3), dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.19, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,819, yang menunjukkan bahwa 81,9% variasi Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD. Sisanya sebesar 18,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam penelitian ini, seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerapan prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, fasilitas kerja, kompensasi, ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, maupun faktor organisasi lainnya. Nilai R sebesar 0,908 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berada pada kategori sangat kuat, sehingga model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian, model penelitian yang dibangun dapat dikatakan memiliki tingkat *goodness of fit* yang tinggi dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti.

Pembahasan.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kompetensi aparatur yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam memahami regulasi keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menjadi faktor penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara teoritis, kompetensi aparatur merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan (Wibowo, 2014). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, aparatur yang kompeten akan lebih mudah memahami proses pencatatan, pengelolaan, hingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusnadi (2022), Dewi dan Dewi (2020), serta Kaifah dan Tryana (2020) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Kapriana dan Agung (2020) serta Maydiyanti dkk. (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, aparatur yang menangani pengelolaan keuangan pada OPD Pemerintah Provinsi Papua umumnya memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kondisi tersebut mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan serta memudahkan aparatur memahami prosedur akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Keberadaan sistem akuntansi yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mampu mendukung proses pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan secara akurat, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Secara teoritis, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur dan mekanisme yang digunakan pemerintah daerah untuk mengelola transaksi keuangan dan menghasilkan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Melalui penerapan SAKD yang efektif, setiap transaksi keuangan dapat dicatat dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga meningkatkan keandalan, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan. Keberhasilan implementasi SAKD menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adhivina dan Hikmahwati (2020) serta Pratiwi dan Wahyundaru (2020) yang menyimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Ferdian (2021) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem akuntansi sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi dan kemampuan aparatur dalam memanfaatkan sistem yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada OPD Pemerintah Provinsi Papua telah berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur yang mampu mengoperasikan sistem sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi tersebut memungkinkan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Dengan demikian, optimalisasi penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah perlu terus dipertahankan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengendalian internal telah diterapkan, keberadaannya belum mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD tidak sepenuhnya ditentukan oleh efektivitas sistem pengendalian internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kompetensi aparatur dan sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adhivina dan Hikmahwati (2020) serta Ferdian (2021) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Kusnadi (2022), Widodo dan Maharani (2021), serta Lituely (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tingkat kepatuhan organisasi dalam menjalankan fungsi pengendalian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, sistem pengendalian internal pada OPD Pemerintah Provinsi Papua telah diterapkan, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal pada seluruh aspek pengendalian. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengendalian belum sepenuhnya mampu mencegah kesalahan, meningkatkan ketelitian pencatatan, maupun memperkuat keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua perlu memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Internal melalui peningkatan fungsi pengawasan, evaluasi berkala, serta peningkatan kepatuhan aparatur terhadap prosedur pengelolaan keuangan agar pengendalian yang diterapkan dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu, tetapi merupakan hasil sinergi antara kompetensi aparatur yang memadai, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif, serta pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik. Semakin baik ketiga aspek tersebut diterapkan secara bersama-sama, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Secara konseptual, kompetensi aparatur pemerintah menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan pegawai dalam memahami regulasi, mengoperasikan sistem keuangan, serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Di sisi lain, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berfungsi sebagai sarana pengelolaan dan penyajian informasi keuangan secara sistematis, sedangkan Sistem Pengendalian Internal berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk menjamin keandalan informasi keuangan serta meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam mendukung terwujudnya laporan keuangan yang akurat, relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Dewi (2020) yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini didukung oleh penelitian Pratiwi dan Wahyundaru (2020) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil observasi, OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi memadai serta penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah terimplementasi dengan baik. Namun demikian, efektivitas pengendalian internal masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mendukung proses pengelolaan keuangan secara lebih optimal. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan perlu dilakukan melalui pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, serta penguatan fungsi pengendalian internal sehingga dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sementara itu, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara simultan, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,819 menunjukkan bahwa 81,9% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu difokuskan pada penguatan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah agar mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Meskipun Sistem Pengendalian Internal tidak terbukti berpengaruh signifikan secara parsial, keberadaannya tetap penting sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sinergi antara kompetensi aparatur, sistem akuntansi yang efektif, dan pengendalian internal yang memadai menjadi faktor penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang mengandalkan persepsi responden sehingga masih terdapat kemungkinan adanya subjektivitas dalam pemberian jawaban. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal, sehingga belum mampu menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara komprehensif.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi lainnya agar diperoleh hasil yang lebih representatif. Penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, good governance, komitmen organisasi, budaya organisasi, serta kompetensi digital aparatur. Penggunaan metode penelitian yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Alya Citra Utomo dkk. (2021), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro), *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 2, No. 2, Hal.145-162, Oktober 2021.
- Andi Kusnadi (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi dan Keuangan* Vol. 1, No. 1, hal. 51-63, Maret 2022,
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Chariri, & Ghozali, I. (2017). *Teori Akuntansi*. Semarang : Diponegoro, Penerbit Universitas.
- Fathia, N. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016

- I Gusti Ayu Krisna Dewi dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, (2020), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Akuntansi Profesi*, p-ISSN : 2338 6177, e-ISSN : 2686-2468, Vol. 11 No. 1 Juni 2020
- Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 26–37.
- Kapriana, A. P., & Agung, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Kuburaya). *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 9(1), 47–70.
- Litually, J. W. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal Kalwedo Sains (KASA)*, 1(1), 42–49.
- Maydiyanti, Siska, Putri, Annie Mustika, & Anriva, Della Hilia. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69–78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi* (Edisi 4). Salemba Empat.
- Murapi, I. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i1.660>
- Noch, M. Y., & Husen, S. (2015). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen* (M. B. H. Ibrahim (ed.)). Perdana Publishing.
- Praptiningsih, & Yetty, F. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan dan Administrasi Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 5(1), 103–208.
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>
- Putri, N. R., & Agustawan. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Muhammadiyah Riau *Accounting and Business Journal*, 1(2), 100–109.
- Rohmah, Lailatur, Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra* 09(05): 43–51.
- Rusnadia Wafa dkk. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan). P-ISSN: 2579-969X; E-ISSN: 2622-7940, 60(1-3), 2019.
- Setyowati, Lilis, Wikan, I., & Pratiwi Ririh Dian. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.” *Kinerja* 20(2): 179–91. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.” *Kinerja* 20(2): 179–91.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama.
- Tommy Ferdian. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo) *Jurnal Akrab Juara* Volume 6 Nomor 5 Edisi Halaman 35-48, Desember 2021

- Vidya Vitta Adhivinna, A. N. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* Vol. 17 No. 1.
- Widodo, S., & Maharani, R. R. (2021). Pengujian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah. *Journal of Business and Information Systems*, 3(1), 60–74.
- Yuwita Ariessa Pravasanti, (2019) Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo), *Aktsar* ISSN 2622-5255 (online) ISSN 2622-2345 (cetak) Volume 2 Nomor 2, Halaman 199-214, Desember 2019,

Peraturan Perundang-Undangan

- , Peraturan Pemerintah. (2003). Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- , Peraturan Pemerintah. (2004). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah. (2013). Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
- , Peraturan Pemerintah. (2015). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- , Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;